



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

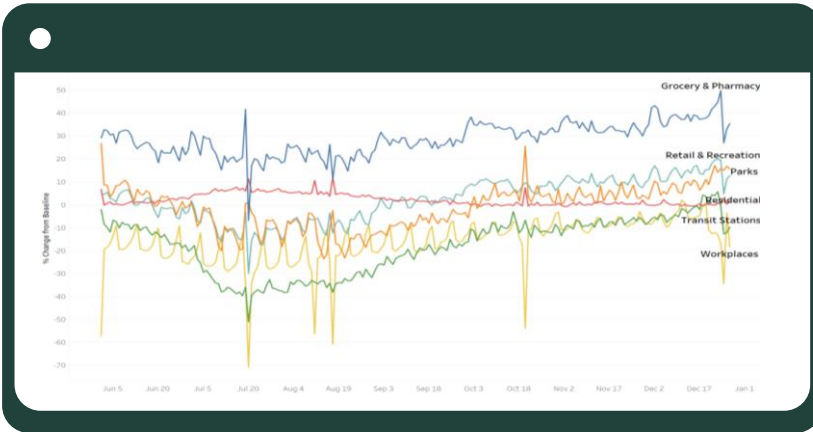
# LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Periode 20 Desember s.d. 31 Desember 2021



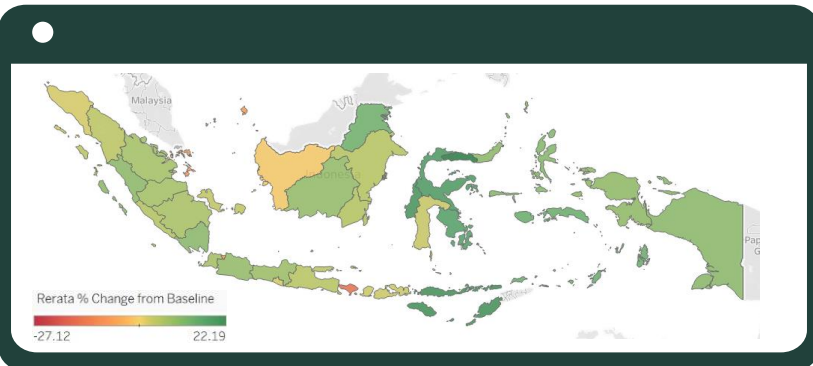
Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi  
Kindy R. Syahrir • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa  
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring  
Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa  
Khishbatur Rizqiyah • Netta An'amta Desli Sanati

## KINERJA EKONOMI DAERAH



- Berdasarkan *mobility index*\*, aktivitas **perekonomian** selama 1 Juni s.d. 27 Desember 2021 di seluruh sektor cenderung mengalami peningkatan, kecuali di **residential** yang cenderung menurun sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat di luar rumah. Meskipun aktivitas *transit stations* dan *workplaces* sudah mengalami peningkatan, namun masih lebih rendah dibandingkan kondisi *baseline* di awal 2020.
- Sebagian besar wilayah sudah mengalami peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan *baseline*, meskipun wilayah seperti Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jakarta, masih belum kembali kondisinya seperti *baseline*.

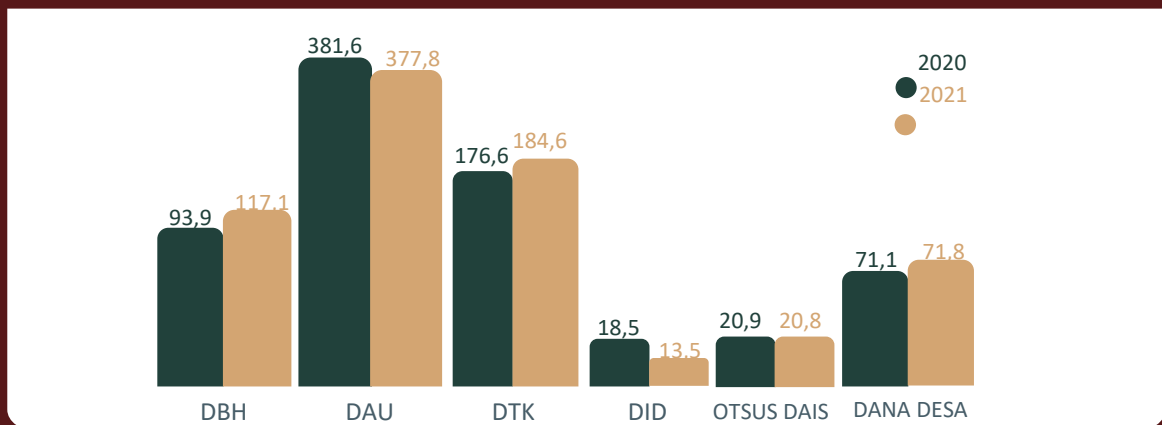
\*Data google mobility



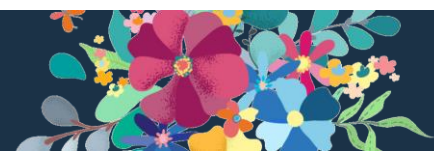
## KINERJA TKDD DAERAH

### Grafik TKDD

Realisasi TKDD s.d. 31 Desember 2021 YoY (dalam Triliun)



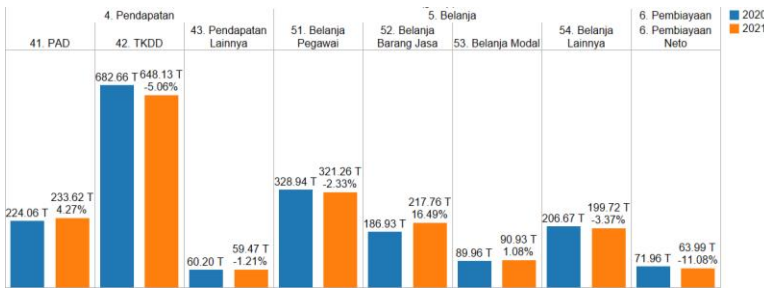
- Secara YoY, realisasi TKDD s.d. **31 Desember 2021** sebesar Rp785,7 T mengalami **kenaikan 3%** dibandingkan realisasi s.d. 17 Desember 2020 sebesar Rp762,5 T.
- DAU** mengalami **penurunan** sebesar **1%** akibat adanya penambahan persyaratan kinerja mulai DAU Februari 2021. Sedangkan **DBH** mengalami **kenaikan** sebesar **24,8%**, **DTK** naik **4,6%**, dan **Dana Desa** naik sebesar **1,1%**.
- Realisasi BLT ke Rekening Kas Desa sebesar **Rp20,2 T**.



## KINERJA FISKAL DAERAH

Grafik 1

Realisasi APBD s.d. November 2021 YOY



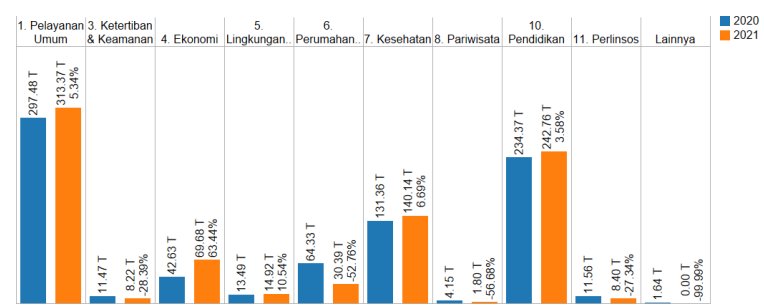
- Realisasi Pendapatan terkontraksi sebesar 2,66% secara YoY dari Rp966,92 T menjadi Rp941,22 T. Penurunan terbesar di TKDD sebesar 5,06%, namun realisasi PAD sudah mengalami kenaikan secara YoY sebesar 4,27%.

- Realisasi Belanja sudah mengalami kenaikan sebesar 2,11% secara YoY dari Rp812,50 T menjadi Rp829,67 T, dengan kenaikan tertinggi di Belanja Barang dan Jasa sebesar 16,49%.

- Pembiayaan Neto turun 11,08% secara YoY yang sumber utamanya adalah penurunan di Penggunaan SILPA TA Sebelumnya sebesar 18,01% dari Rp76,82 T menjadi Rp62,98 T, sedangkan Penerimaan Pinjaman justru naik sebesar 205,97% dari Rp2,87 T menjadi Rp8,80 T.

Grafik 2

Realisasi APBD s.d. November 2021 YOY

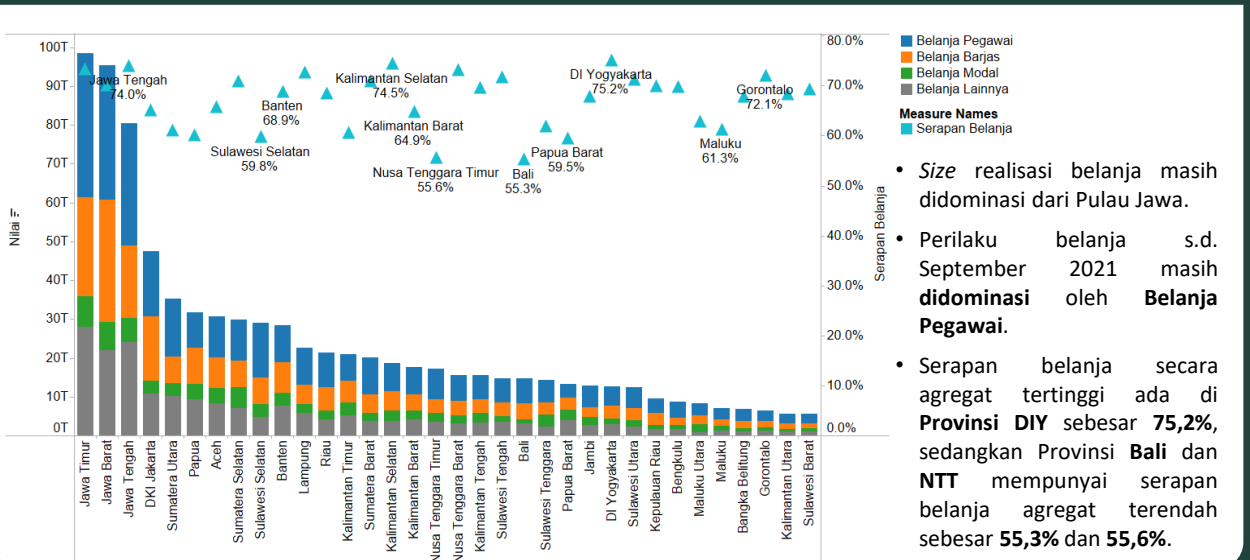


- Fungsi yang mengalami penurunan realisasi terbesar adalah Pariwisata sebesar 56,68% dan Perumahan & Fasum sebesar 52,76%.

- Fungsi Ekonomi dan Lingkungan Hidup merupakan fungsi dengan peningkatan YoY tertinggi, yaitu berturut-turut sebesar 63,44% dan 10,54%.

Grafik 3

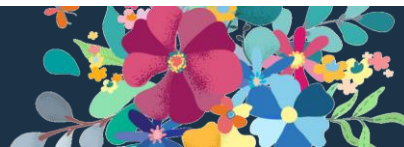
\*Realisasi s.d. September 2021 bersifat sementara per 17 Desember 2021



- Size realisasi belanja masih didominasi dari Pulau Jawa.

- Perilaku belanja s.d. September 2021 masih didominasi oleh Belanja Pegawai.

- Serapan belanja secara agregat tertinggi ada di Provinsi DIY sebesar 75,2%, sedangkan Provinsi Bali dan NTT mempunyai serapan belanja agregat terendah sebesar 55,3% dan 55,6%.



## ASPEK SOSIAL DAERAH

Dalam kurun waktu satu tahun diterbitkannya Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) dari edisi IX sampai dengan edisi XXIV selama tahun 2021, terdapat berbagai tema kinerja daerah yang telah disajikan. Adapun berikut adalah rangkuman LPEFD Periode 2021 sekaligus menjadi penutup LPEFD untuk tahun 2021.



### Kinerja Pelayanan Irigasi

Dibuka dengan laporan terkait [kinerja pelayanan irigasi](#) dalam LPEFD Edisi IX, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kualitas pengelolaan sistem irigasi di Indonesia yakni perubahan iklim, konversi lahan, serta keandalan air. Berdasarkan audit kinerja jaringan irigasi 2014, kondisi dan fungsi prasarana irigasi permukaan nasional masih belum optimal. Seluas 46% atau sekitar 3,3 juta ha prasarana irigasi dalam kondisi dalam kondisi rusak, dimana 7,5 % merupakan kewenangan pusat sedangkan 8,26% merupakan irigasi kewenangan provinsi dan 30,4% merupakan kewenangan kabupaten/ kota.

### Kinerja Ketahanan Pangan

Adapun kinerja sistem irigasi secara langsung juga memengaruhi kinerja ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, pada edisi selanjutnya, [kinerja ketahanan pangan](#) dibahas dari segi produktivitas yang perlu dioptimalisasi baik dari segi anggaran ketahanan pangan maupun kesejahteraan petani/peternak. Anggaran ketahanan pangan merupakan anggaran belanja dalam APBD untuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang merupakan bagian dari belanja fungsi ekonomi. Berdasarkan APBD 2020, daerah dengan porsi belanja ketahanan pangan terbesar didominasi oleh daerah di luar Pulau Jawa. Namun begitu, Pulau Jawa adalah pulau dengan luas panen padi terluas di Indonesia meskipun angka produktivitas tertinggi berada di Pulau Bali. Berbanding terbalik dengan produktivitasnya, Pulau Bali justru menduduki peringkat terbawah untuk NTP Petani seluruh subsektor, lebih lanjut sebagian Pulau Jawa seperti Jabar, Jateng, Banten, dan Yogyakarta juga menempati 3 terbawah untuk NTP Tanaman Perkebunan dan Peternakan. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terkait kesejahteraan tenaga kerja baik di sektor primer maupun sektor lainnya.



### Kinerja Ketenagakerjaan

Pada edisi berikutnya, dibahas mengenai [kinerja ketenagakerjaan](#) yang dikhususkan pada indikator terdampak pandemi seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta laju pertumbuhan Angkatan Kerja Menganggur yang mengalami tren peningkatan. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan banyak sektor kehilangan pendapatan dan banyak bisnis gulung tikar sehingga berdampak pada peningkatan pengangguran. Lebih lanjut, dampak ini juga dirasakan pada aspek pengentasan kemiskinan.



## ASPEK SOSIAL DAERAH

### Kinerja Pengentasan Kemiskinan

Sehingga pada edisi XII dibahas mengenai kinerja pengentasan kemiskinan yang mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada semester 2 Tahun 2020, 10.19% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini lebih tinggi dari bulan Maret 2021 yakni sebesar 9.87%. Adapun berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa dalam membantu masyarakat untuk dapat bertahan dalam keadaan pandemic COVID-19 seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Dana Insentif Daerah, serta Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

### Kinerja Ketimpangan

Kinerja kemiskinan juga erat kaitannya dengan ketimpangan, oleh karena itu dalam LPEFD edisi XX ditekankan mengenai kinerja ketimpangan yang secara nasional mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020. Selain dari sisi antar kelompok pendapatan, ketimpangan juga terjadi secara spasial. Secara umum, ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y). Kontraksi tersebut dirasakan berbeda antar wilayah, meski masih ada wilayah yang mencatatkan angka positif, yakni Sulawesi, Maluku, dan Papua. Namun demikian, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah wajah ketimpangan spasial nasional, yang masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera.



### Kinerja Pariwisata



Selain aspek sosial, pandemi juga berdampak pada aspek ekonomi diantaranya sektor terdampak adalah sektor pariwisata. Pada edisi X, sektor pariwisata Indonesia dapat dikatakan mengalami economic turmoil dengan terjadinya penurunan penumpang domestik sebesar 90% YoY dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi di Bandara Ngurah Rai, Bali, yakni sebesar 97.52%. Hal ini mengakibatkan Provinsi Bali mengalami gejala ekonomi yang cukup besar dikarenakan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pariwisata. Oleh karenanya, Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan mendesain berbagai kebijakan untuk merespon dinamika ini salah satunya dengan menerbitkan PMK nomor 46/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Tidak hanya terkait wisatawan, pendapatan daerah pun banyak mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.



## ASPEK EKONOMI DAERAH

### Kinerja Daerah Desa



Beranjak dari isu sosial ekonomi yang terjadi within district, LPEFD juga menangkap isu accros district di mana kinerja daerah juga berbeda-beda tergantung aspek. Pada LPEFD edisi XIV, pertamanya disorot mengenai kinerja pemerintahan unit terkecil yakni desa. Kinerja pembangunan desa mulai menjadi perhatian karena Desa memiliki APBDes dan juga dukungan pendanaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat yakni Dana Desa. Pelaksanaan Dana Desa mendorong semakin menurunnya desa tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2015, jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal mencapai 32.256 desa dan 9.056 desa. Pada tahun 2020, jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal turun drastis dimana desa tertinggal menurun 56,7% (18.295 desa) dan desa sangat tertinggal berkurang 72,8% (6.590 desa). Di sisi lain, jumlah desa maju dan desa mandiri semakin meningkat. Jumlah desa maju pada tahun 2015 sebanyak 3.576 desa dan desa mandiri hanya 173 desa. Pada tahun 2020 jumlah desa mandiri telah mencapai 1.740 desa atau meningkat 906% (1.568 desa), sedangkan desa maju bertambah 233% (8.341 desa) menjadi 40.035 desa. Peningkatan status desa tersebut menunjukkan adanya tren yang semakin baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### Kinerja Daerah Perbatasan, Daerah Kepulauan, dan Daerah Tertinggal

Lebih lanjut, LPEFD edisi XV s.d XVIII berturut-turut mengangkat tema mengenai kinerja daerah perbatasan, daerah kepulauan, daerah tertinggal, hingga daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Untuk daerah dengan 3 kategori pertama yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki kinerja pelayanan publik yang relatif masih di bawah rata-rata. Baik daerah perbatasan, kepulauan, dan tertinggal, ketiganya masih membutuhkan dukungan dan afirmasi khusus untuk dapat mengejar capaian rerata nasional. Adapun untuk daerah berkapasitas fiskal tinggi pun tidak luput dari tantangan yang besar yakni terkait penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selain itu tantangan lain yang dihadapi adalah terkait pengelolaan keuangan daerah yang belum berkualitas, potensi natural resources curse bagi daerah dengan SDA melimpah, serta tantangan pengelolaan sampah. Oleh karenanya, apapun kategori daerah, tidak ada kebijakan yang one-size-fit-all sehingga menjadi catatan penting bagi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa serta seluruh stakeholder terkait untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan tepat guna.



### Kinerja Daerah Terdampak COVID-19

Sampai pertengahan tahun 2021, pandemi COVID-19 masih merajalela. PPKM masih diberlakukan serta terdapat ancama varian baru yang dinyatakan lebih menular. LPEFD XIX terbit dengan mengupas kinerja pada daerah-daerah terdampak COVID-19. Provinsi DKI merupakan provinsi dengan kasus tertinggi dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tertinggi yakni sebesar 37.1% (2020) dibanding tahun 2019. Sedangkan peningkatan jumlah pengangguran terbesar terjadi di Provinsi Bali dengan lonjakan sebesar 258.6% dari angka capaian 2019.



## ASPEK KEUANGAN DAERAH



### Kinerja Belanja Daerah

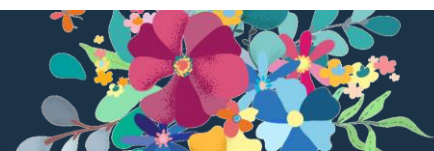
Setelah menyajikan kinerja daerah dari segi sosial, ekonomi, dan antarkategori, kini giliran LPEFD menyoroti lebih dalam mengenai keuangan daerah. Di mulai dari LPEFD edisi XXI dan XXII, kinerja daerah yang disorot adalah mengenai belanja daerah. Bagi sebagian daerah, pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki kontribusi yang signifikan untuk menggerakkan perekonomian daerahnya. Dilihat dari jenis belanja, maka belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi yang utamanya berasal dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Secara rata-rata alokasi belanja operasi pada tahun 2021 adalah 67,94% dari total belanja APBD TA 2021. Adapun di tingkat kabuapten/kota, 5 daerah dengan porsi belanja pegawai tertinggi berada di angka 52.1% -54.7% sedangkan di tingkat provinsi berkisar antara 33.4% s.d 39.8%. Ke depan, dengan ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD), terdapat ketentuan mengenai porsi belanja pegawai yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kualitas belanja daerah agar dapat berkontribusi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Tata Kelola Keuangan Daerah

Selanjutnya, tata kelola keuangan daerah termasuk di dalamnya belanja daerah diaudit oleh BPK untuk mendapatkan status atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui opini BPK atas LKPD, setidaknya kita dapat mengetahui apakah LKPD yang bersangkutan memenuhi standar pelaporan yang telah ditentukan. Pada edisi XXIII, dibahas mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan opini BPK atas LKPD. Pada halaman editorial, tema yang diangkat adalah terkait Opini LKPD dan kinerja daerah. Pada 2021, mayoritas daerah telah memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemda telah mampu mempertanggungjawabkan dan melaporkan keuangannya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, kasus korupsi di daerah tetap marak dan kinerja peningkatan kesejahteraan di daerah masih perlu dioptimalkan. Untuk itu, di masa depan, pengelolaan keuangan daerah harus terus ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi administrasi maupun substansi.

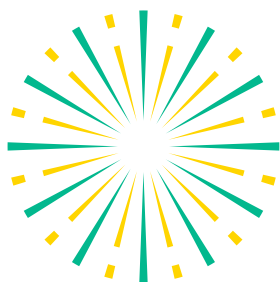
### Penutup

Terakhir, sebagai penutup, LPEFD edisi XXIV kembali membahas terkait kinerja pariwisata setelah lebih dari satu setengah tahun pandemi COVID-19 menghantam perekonomian Indonesia. Sampai dipenghujung tahun, data menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum sepenuhnya pulih. Namun begitu, pemerintah tetap terus berkomitmen untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai paket kebijakan baik untuk menjaga daya beli masyarakat, maupun mendorong dari sisi pengusaha agar terus bertahan menghadapi gejolak ekonomi akibat pandemi. Perekonomian mulai pulih, aktivitas masyarakat mulai meningkat kembali, namun begitu ancaman varian baru serta dampak perekonomian global tetap harus kita waspadai. Kita semua berharap ekonomi Indonesia memiliki resiliensi yang tinggi, begitu juga dengan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas sampai kita benar-benar terbebas dari pandemi. Di sisi lain, para pelaku usaha harus dapat beradaptasi dan berinovasi untuk tetap dapat bertahan dan menaklukkan keadaan sampai perekonomian dunia kembali pulih



## Arah Baru Hubungan Keuangan Pusat - Daerah

Oleh Dhani Kurniawan



**Babak Baru Desentralisasi Fiskal.** Setelah pemerintah dan DPR merampungkan serangkaian pembahasan, Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Produk hukum ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

Perjalanan panjang desentralisasi fiskal kini telah memasuki babak baru. Harapan untuk mewujudkan *the next level* dari hubungan keuangan pusat dan daerah terpampang di depan mata. Menarik untuk kita cermati, beberapa poin penting dari undang-undang yang terdiri dari 193 Pasal dan terbagi dalam 12 Bab itu. UU HKPD didesain untuk mengakselerasi perbaikan dan pemerataan layanan publik. Terdapat empat pilar yang sangat penting di dalamnya.

Pertama, meminimalkan ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah maupun horizontal antar pemerintah daerah. Kedua, melakukan harmonisasi belanja pusat dan daerah agar lebih selaras. Ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah. Keempat adalah penguatan *local taxing power*.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula hanya diperuntukkan bagi origin dan non-origin pada provinsi yang sama, saat ini telah memperhitungkan daerah perbatasan pada provinsi yang berbeda. Pengalokasian DBH juga akan memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan maupun perbaikan lingkungan yang terdampak atas aktivitas eksplorasi.

Untuk memberikan alternatif pembiayaan pembangunan di daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diatur mengenai perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati. Daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Skema pinjaman daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman. Perluasan akses pembiayaan bagi Daerah juga diikuti dengan penyederhanaan proses pelaksanaan pembiayaan melalui pengintegrasian persetujuan DPRD atas pembiayaan utang daerah dalam proses pembahasan RAPBD.

Undang-Undang ini juga mengatur sinergi kebijakan yang dilakukan melalui penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan daerah, kebijakan pengendalian defisit, dan pembiayaan utang Daerah. Diatur pula pengendalian anggaran dalam kondisi darurat sehingga dapat berfungsi sebagai *countercyclical policy*. Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah ini didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai bagan akun standar yang terintegrasi.

Dalam 2 dekade terakhir, jumlah transfer ke daerah terus meningkat dan porsinya cukup besar dalam alokasi APBN tetapi belum disertai dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Penyebabnya antara lain adalah tata kelola belanja daerah yang belum efisien, kurang efektif, dan masih belum seluruhnya menerapkan disiplin anggaran secara baik.

Perbaikan tata kelola demi terwujudnya *quality spending* ini menjadi hal krusial yang coba dipercepat dengan undang-undang ini agar menghasilkan output yang berkualitas dan *outcome* yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pengelolaan transfer ke daerah lebih mengedepankan pengelolaan yang berbasis kinerja daerah.





## Arah Baru Hubungan Keuangan Pusat - Daerah



Penguatan *local taxing power* agar daerah lebih berdaya juga menjadi salah satu pilar penting. Perubahan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. Langkah yang ditempuh adalah konsolidasi struktur pajak daerah dan retribusi daerah, perluasan basis pajak daerah, serta harmonisasi pengaturan dengan peraturan terkait khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi pajak daerah dilakukan melalui reklasifikasi pajak daerah untuk menghindari adanya duplikasi pemungutan dan menyederhanakan administrasi. Penyederhanaan retribusi daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi daerah untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik.

Selanjutnya, menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawal kebijakan yang telah dirancang baik ini agar implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu meningkatkan layanan publik agar kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Tidak berlebihan rasanya apabila kita menaruh harapan besar pada UU HKPD untuk menjadi booster yang menguatkan bangsa ini bangkit bersama dari pandemi.

*Telah dimuat dalam harian Bisnis Indonesia pada tanggal 16 Desember 2021*

